



**Ika Afanita S SSI MSc**  
Prodi Geografi  
Fak Sains dan Teknologi  
Universitas Amikom Yogyakarta

**MANUSIA** sebagai makhluk sosial tidak akan terlepas untuk melakukan interaksi, komunikasi, dan aktivitas dengan orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu aktivitas manusia yang juga menjadi salah satu faktor penentu dalam perkembangan dinamika kependudukan adalah mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk adalah gerak atau perpindahan penduduk dari suatu wilayah (geografis) ke wilayah lain dalam

## Trend Mobilitas Penduduk Berdasar Data Community Mobility Reports di Indonesia

jangka waktu tertentu. Namun, adanya pandemi covid 19 telah menghambat kegiatan mobilitas penduduk secara langsung dalam masyarakat. Hal ini tentu saja sebagai wujud dari upaya mencegah penyebaran virus covid 19 karena adanya aktivitas antar manusia yang tinggi dan intens meningkatkan kerawanan penyebaran virus covid 19. Salah satu rekomendasi dalam upaya pencegahan penularan covid 19 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid 19 Tahun 2020 adalah melakukan physical distancing. Hal yang dapat dilakukan dalam menerapkan physical distancing yaitu menghindari kerumunan serta membatasi kegiatan interaksi antar manusia. Implikasi upaya ini salah satunya dapat kita lihat melalui kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) beberapa Pemerintah Daerah dengan membatasi mobilitas penduduk baik migrasi

keluar maupun migrasi masuk penduduk dalam wilayah tertentu. Pandemi covid 19 telah berjalan hingga 11 bulan di Indonesia sejak 15 Maret 2020 dengan jumlah pasien positif sebanyak 21 orang, kini per 7 Januari 2021 pasien positif mencapai 9.321 orang. Perbedaannya mencapai hampir 422 kali lipat dari jumlah awal terkonfirmasi. Nah, bagaimana dengan pola trend mobilitas penduduk yang terjadi selama pandemi covid 19? Community Mobility Report adalah data open access yang disediakan oleh Google berdasarkan kumpulan data melalui setelan histori lokasi pada mobile phone pengguna. Data tersebut membagi beberapa kategori aktivitas mobilitas masyarakat mencakup retail dan rekreasi, toko bahan makanan dan apotek, taman, pusat transportasi umum, tempat kerja, dan area permukiman. Data ini juga memberi keterangan temporal dan spasial wilayah tertentu. Informasi yang disajikan dapat dimanfaatkan

oleh masyarakat sebagai upaya meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana pandemi covid 19. Data yang digunakan adalah data mobilitas masyarakat di Indonesia selama pandemi, dimana meninjau perbandingan hasil data mobilitas masyarakat pada 23 April 2020 (saat awal pandemi covid 19 masuk Indonesia) dan 3 Januari 2021. Berdasarkan data yang ada dengan membandingkan garis normal sebagai rerata kegiatan masyarakat sebelum pandemi, maka kecenderungan yang ada dari 6 macam kategori, 5 kategori aktivitas masyarakat mengalami penurunan dari kondisi normal sebelum pandemi. Pada awal pandemi 23 April 2020 penurunan tertinggi mencapai -53% pada kategori pusat transportasi umum, kedua tertinggi adalah mobilitas di taman seperti kunjungan ke lapangan terbuka, taman nasional, taman umum yang

mencapai -43%, sisanya adalah retail dan rekreasi -37%, tempat kerja -22%, dan toko kebutuhan pokok dan obat-obatan sebanyak -8%. Disisi lain aktivitas di area permukiman mengalami kenaikan sebanyak +15% dari kondisi normal sebelum covid 19. Hingga 11 bulan pandemi covid 19 berjalan, aktivitas mobilitas masyarakat juga masih mengalami penurunan meskipun sudah menunjukkan peningkatan menuju kondisi normal. Hal ini dapat dilihat dari data mobilitas masyarakat per 3 Januari 2021 dimana masih menurun dengan nilai transportasi publik -22%, retail dan rekreasi -21%, tempat kerja -9%, taman -6%, dan toko kebutuhan serit obat-obatan -2%. Berdasar 5 kategori, aktivitas di pusat transportasi umum masih paling rendah dengan nilai -22%, tentu saja hal ini dapat dipengaruhi atas preferensi masyarakat untuk lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi daripada kendaraan umum

jika memang terpaksa harus melakukan mobilitas atau perjalanan ke tempat lain, dengan tujuan lebih merasa aman tanpa kontak dengan orang lain secara umum atau berkerumunan. Adapun kegiatan di area permukiman juga masih meningkat daripada saat kondisi normal yaitu +9%, kondisi ini juga didukung karena masih ada kebijakan School From Home dan Work From Home sehingga aktivitas mobilitas masyarakat masih banyak berada di sekitar area rumah. Berdasarkan perbandingan dua data mobilitas masyarakat di Indonesia pada awal pandemi 23 April 2020 dan 3 Januari 2021 yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diketahui meskipun mengalami penurunan aktivitas pada 5 macam kategori juga telah mengalami kenaikan menuju angka normal / aktivitas normal. Hal ini ditunjukkan dengan kenaikan menuju angka normal pada aktivitas transportasi publik naik 31%, retail dan rekreasi



16%, tempat kerja 13%, taman 37%, dan toko kebutuhan harian dan obat-obatan 6%. Kegiatan di area permukiman juga telah menurun hanya +6%. Kenaikan aktivitas masyarakat dengan ditunjukkan mulai menuju angka normal, ternyata berbanding lurus dengan jumlah pasien covid 19 yang mengalami kenaikan juga hingga per 7 Januari 2021 mencapai 9.321 orang. Walaupun demikian kajian ini juga masih perlu ditinjau lebih lanjut, adanya hubungan aktivitas mobilitas penduduk dengan meningkatnya pasien terkonfirmasi covid 19. Namun demikian penerapan protokol kesehatan wajib dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat, serta disiplin menerapkan 3M (Menggunakan Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak) dan 3T (Tracing, Testing, Treatment) secara bersinergi.\*\*\*

## Pemkab-

menghidupkan kembali pembatasan seperti awal terjadinya pandemi Covid-19. Tindak lanjut implementasi PTKM tersebut sepenuhnya diserahkan kepada Pemkab/Pemkot se-DIY yang mempunyai kewenangan wilayah," ujar Baskara Aji di Yogyakarta, Kamis (7/1).

Baskara Aji menjelaskan instruksi gubernur tersebut berisikan 8 poin yang intinya pertama pembatasan tempat kerja perkantoran dengan menerapkan 50 persen Work From Home (WFH) dan 50 persen Work From Office (WFO) dengan melaksanakan protokol kesehatan (prokes) dengan ketat. Kedua kegiatan belajar mengajar secara dalam jaringan (daring) untuk semua jenjang pendidikan.

"Ketiga, sektor esensial berkaitan dengan kebutuhan pokok boleh beroperasi 100 persen dengan prokes ketat. Selanjutnya keempat, kegiatan restoran hanya diperbolehkan makan di tempat 25 persen dan layanan pesan antar sesuai jam operasional restoran serta pembatasan jam ope-

rasional pusat perbelanjaan, mal, pasar tradisional dan lain-lain hingga pukul 19.00 WIB," tuturnya.

Kemudian kelima, kegiatan kontrusi diizinkan beroperasi 100 persen dengan penerapan prokes ketat. Keenam, mengizinkan tempat ibadah dibuka dengan kapasitas 50 persen dengan prokes ketat. Ketujuh, meminta seluruh Kepala Daerah Bupati/ Walikota di DIY untuk melakukan penerapan disiplin dan penegakan hukum prokes sebagai upaya pencegahan serta pengendalian Covid-19 di wilayah masing-masing.

"Terakhir kedelapan, memerintahkan kepada Pemerintah Desa/Kalurahan untuk melakukan pencegahan Covid-19 di wilayahnya dan menyampaikan pelaksanaan pada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Bapak Gubernur," imbuh Baskara Aji.

Lebih lanjut, Baskara Aji menyampaikan perihal kesiapan pengawasan hingga penegakan hukum sudah dikoordinasikan baik TNI/Polri, Satpol PP dan sebagainya sampai kabupa-

ten/kota. Sebab intruksi ini ditujukan kepada kabupaten/kota se-DIY yang mempunyai wilayah.

"Okupansi tempat tidur pasien Covid-19 Rumah Sakit (RS) di DIY sudah mencapai 80 persen dan masuk lima besar nasional penggunaan tempat tidur tertinggi. Belum lagi tren kasus konfirmasi positif di DIY masih tinggi, jadi kita sudah dengan menerapkan PTKM ini, sehingga tetap hati-hati supaya semua aman," ungkapnya.

Sebelumnya Wakil Gubernur DIY, KGPAAPaku Alam X didampingi oleh Sekda DIY, Baskara Aji memimpin rapat berkaitan dengan ini. Rapat ini dihadiri oleh Kepala Dinkes DIY, Kepala Pelaksana BPBD DIY, Kominfo Kepala Biro Hukum serta bupati dan wakil serta walikota seluruh DIY secara daring.

"Pembatasan ini bukan pelarangan, tetapi lebih kepada rasionalisasi kegiatan yang ada di masyarakat maupun di pemerintah," ujar Wagub DIY.

Sementara itu Koordinator Tim Pakar dan Juru

Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito mengungkapkan, kasus harian Covid-19 yang mencapai 8.854 telah menimbulkan banyak korban pasien maupun tenaga kesehatan. Oleh sebab itu, pemerintah mengambil langkah pembatasan kegiatan karena tidak ingin lonjakan kasus harian kembali terjadi. Pemerintah terus berupaya menekan tingginya penambahan kasus harian Covid-19 dengan pembatasan kegiatan masyarakat di Jawa dan Bali pada 11-25 Januari.

"Situasi pandemi di Jawa dan Bali berkontribusi pada peningkatan jumlah kasus secara nasional. Meskipun ada beberapa daerah di luar Jawa dan Bali yang juga berkontribusi terhadap kenaikan kasus. Tapi kita harus lakukan pengendalian agar kasusnya terkendali, tidak timbul korban, dan bisa menjadi modal aktivitas sosial ekonomi ke depan," jelas Wiku dalam talkshow yang ditayangkan melalui akun YouTube BNPB, Kamis (7/1).

Menurut Wiku, meski ada pembatasan tapi bukan

pelarangan. Dengan melakukan pembatasan tersebut, diharapkan kasusnya bisa terkendali dengan cepat. Sehingga bisa kembali stabil, karena masaih harus bertahan dalam waktu cukup panjang. Untuk mewujudkan hal itu perlu kesepakatan dengan seluruh lapisan masyarakat.

Di Klaten, Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Luthfi, pihaknya bersama Kodam IV/Diponegoro telah membuat perencanaan operasi yustisi penegakan protokol kesehatan. "Jadi operasi yustisi yang kita maksudkan adalah di situ ada unit sisi lengkap TNI, Polri dan Satpol PP yang dilakukan minimal satu hari tiga kali. Pagi bisa siang bisa sore bisa," ungkap Kapolda saat ditemui usai latihan gabungan di Mako Brimob Kompi 3 Batalyon C Pelopor, Gunung Kendil,

## 3 Kelompok

golongan masyarakat secara menyeluruh demi mencapai kekebalan komunitas.

Di sisi lain, Wiku menyatakan, proses vaksinasi akan sulit dilakukan jika terjadi tren peningkatan kasus konfirmasi Covid-19, karena itu perlu diambil langkah untuk menekannya. "Pada saat kita mau melakukan vaksinasi tapi penularannya bisa berjalan lancar, maka tentunya penularannya harus ditekan," kata Wiku.

Sementara itu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menandatangani Formulir B Vaksin GAVI COVAX Facility guna melengkapi konfirmasi keikutsertaan dalam pengadaan 108 juta dosis vaksin Covid-19 gratis dari lembaga internasional tersebut.

"Ini adalah salah satu milestone penting untuk Indonesia untuk bisa memperoleh akses atas maksimal 108 juta dosis vaksin gratis dari GAVI," kata Menkes.

Aliansi Vaksin Dunia (GAVI) dengan COVAX Facility adalah lembaga internasional yang berupaya untuk mendukung agar 92 negara dengan pendapatan menengah dan bawah untuk mendapatkan vaksin Covid-19 gratis sebagai kesetaraan.

Sebelumnya pada 7 Desember 2020, Kemenkes juga telah menandatangani Formulir A yang berisi kelengkapan teknis untuk keikutsertaan Indonesia dalam pengadaan vaksin Covid-19 gratis. Sementara pada Formulir B ini merupakan konfirmasi keikutsertaan Indonesia untuk mendapatkan vaksin gratis dari GAVI COVAX Facility.

## Sambungan hal 1

Beberapa lokasi yang sering terjadi banyak kerumunan akan menjadi titik fokus operasi yustisi. "Operasi yustisi ini dilaksanakan dengan maksud memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan 3M. Di samping membiasakan masyarakat tetapi juga mendidik masyarakat untuk memutus rantai itu sendiri," terangnya.

Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Boyolali, Masruri akan terus mengadakan operasi yustisi yang sudah rutin dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali di seluruh wilayah. "Untuk penekanan protokol kesehatan dan penegakan pelanggaran disiplin kesehatan," kata Sekda Masruri.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo opti-

mis pelaksanaan Perlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dapat menekan penyebaran Covid-19. Alasannya, dari momentum pembatasan yang dilakukan pada pertengahan September hingga November tahun lalu telah dapat menurunkan kasus aktif dari 67 ribu menjadi 54 ribu atau turun hingga kurang lebih 20 persen. Dia juga berharap pada periode ini, persentase penurunan angka kasus dapat lebih besar lagi.

"Artinya pengalaman yang lalu ini sekarang kita ulangi kembali lewat pembatasan dan kita harapkan persentasenya bisa lebih besar dibandingkan pada periode September dan November awal. Pada saat itu terjadi penurunan sekitar 20 persen," ujar Doni di Jakarta, Kamis (7/1).

(Ira/Ria/Ati\*/-1/Sit/Ati)-d

## Gunung

Krasak dengan jarak luncurnya sejauh 400 meter dari puncak, Pemkab Sleman menyiapkan beberapa langkah jika skala bahayanya berubah.

Sebelumnya BPBD Sleman hanya mengevakuasi kelompok rentan yang berada di radius 5 km dari puncak Gunung Merapi yakni warga di Kalitengah Lor. "Kami sudah menyiapkan barak untuk daerah Pakem dan Turi apabila nanti ancaman berubah. Jumlah barak ada 12, kita sudah siapkan semua dengan sekat protokol kesehatan. Sewaktu-waktu ancaman meningkat dan dengan pengungsi bertambah, kami sudah siap semua barak baik itu sanitasi, kasur dan selimut," jelas Joko Supriyanto, Kamis (7/1).

Namun dengan aktivitas vulkanik Gunung Merapi saat ini, belum ada instruksi evakuasi bagi masyarakat di wilayah Sleman Barat. Menurut Joko, di Sleman wilayah Barat, jarak Padukuhan terdekat dari Merapi adalah Turgo, Purwobinangun dengan jarak 6-7 kilometer. Joko mengungkapkan, meskipun belum ada instruksi untuk mengungsi, masyarakat setempat, sekolah siaga bencana sudah di edukasi. Sehingga masyarakat sudah paham apa yang harus dilakukan jika sewaktu-waktu terjadi erupsi. "Di wilayah Turgo, kurang lebih ada 150 orang dan Padukuhan tersebut masih berjarak 6-7 kilometer," tandas Joko.

Bupati Sleman Sri Purnomo menambahkan, peningkatan aktivitas Gunung Merapi masih belum berdampak di Kabupaten Sleman. Namun Bupati menegaskan, pihaknya akan terus melakukan pemantauan dan bersiaga jika ada

instruksi kenaikan status dari BPPTKG. "Kami menyiapkan 12 barak di sekitar lereng Merapi yang tersebar di Cangkringan, Pakem hingga Turi. Semua barak sudah kita benahi dan diberi bilik. Semuanya kapasitas bisa mencapai 1.200," beber Sri Purnomo.

Sementara itu jumlah warga dari kawasan kaki Gunung Merapi wilayah Magelang yang kembali menempati Tempat Evakuasi Akhir (TEA) di 'Desa Saudara'-Nya (sister village), khususnya dari kelompok rentan, kembali bertambah, Kamis (7/1).

Dengan naik puluhan kendaraan, termasuk mobil ambulans, mobil pribadi, 2 kendaraan truk dinas Kodim 0705/Magelang maupun lainnya, banyak masyarakat dari Dusun Babadan 2 Desa Paten Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang, kembali menuju ke TEA Desa Mertoyudan Magelang setelah beberapa hari lalu mereka meninggalkan. Di TEA Desa Mertoyudan mereka secara bergantian diukur suhu badannya, untuk kemudian dilakukan pemeriksaan rapid test.

Sementara itu PIt Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) BPBD Kabupaten Magelang Drs Edy Susanto mengatakan warga kelompok rentan dari Dusun Babadan 2 yang kembali ke TEA Desa Mertoyudan Magelang, Kamis, tercatat 102 jiwa. Dengan adanya tambahan ini, jumlah total pengungsi hingga Kamis pukul 18.00 tercatat 625 jiwa yang menempati 6 titik lokasi pengungsian di wilayah Kecamatan Mertoyudan, Kecamatan Mungkid dan Kecamatan Muntilan.

## Sambungan hal 1

## Sambungan hal 1

## Bangsa

revolusi untuk menjadi bangsa yang maju. Tanpa perlu debat, tempe merupakan makanan bergizi tinggi namun relatif murah harganya. Tempe menjadi makanan khas keseharian masyarakat kita. Kini juga ditiru negara-negara lain.

Banyak orang asing belajar membuat tempe, kemudian dipasarkan di negaranya. Sambutanannya juga luar biasa. Tempe adalah makanan khas Indonesia, dan bahan bakunya juga ada di sini. Mengapa kini perajin tempe kelimpungan? Jawabnya adalah, kedelai sebagai bahan baku, harganya naik. Kenapa naik? Karena kedelai tidak lagi menjadi andalan untuk meningkatkan produksi pangan kita.

Di tengah-tengah sanjungan gemah ripah lohjinawi tersirat ironi. Negeri agraris ini, beras, kedelai, gula pasir, dan produk-produk pertanian ternyata tergantung impor. Beras bukan lagi hanya dari Cianjur atau Delanggu, namun dari Thailand, Vietnam, atau Amerika. Buah-buahan dari Bangkok dan lainnya. Sejak 60 tahun yang lalu hingga tahun 1984 Indonesia berubah dari negara pengekspor menjadi negara pengimpor beras (CP Timmer, *The Political Economy of Rice in Asia: Indonesia*, 1975 dan Asnawi, 1988).

Lagu lama yang selalu didendangkan adalah: Jika panen berlimpah, harga turun drastis. Jika musim tanam tiba, pupuk dan obat-obatan pertanian hilang

misterius! Inilah bentuk kemiskinan struktural yang ditandai meningkatnya jumlah petani gurem. Sketsa buram ini juga ingin menunjukkan bahwa sebenarnya alam Nusantara ini sangat cukup melimpah ketersediaan jumlah pannya. Namun karena tidak dikelola dengan baik, yang terjadi adalah busung lapar dan kemiskinan.

Negara-negara maju seperti Jepang menjadikan pertanian sebagai basis untuk mendukung industrialisasinya. Disana para petani mendapat proteksi dari pemerintah sehingga kesejahteraan terjamin. Revitalisasi pertanian akan bersinggungan dengan reformasi agraria. Dari titik ini reformasi agraria hendaknya menjadi kemauan politik (*political will*).

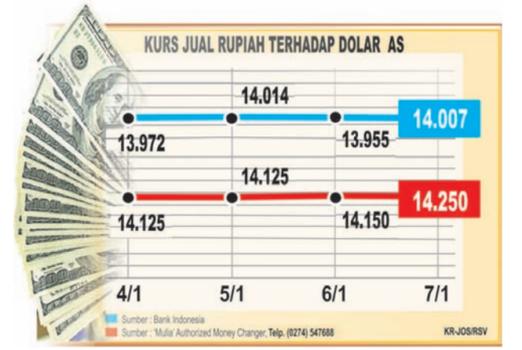
Revitalisasi pertanian tidak sederhana. Persoalan-persoalan seperti: lemahnya modal para petani kecil, menyusutnya pemilihan tanah, ketidakpastian harga, timpangnya nilai tukar petani dengan produk industri (*term of trade*), sulitnya akses informasi dan teknologi (tepat guna) bagi para petani, terputusnya jaringan produksi antara petani dengan industriawan dan seterusnya, merupakan sederetan contoh betapa lemahnya para petani.

Dengan kata lain, revitalisasi pertanian juga menyangkut pembenahan *capital reform* maupun pranata di lembaga-lembaga pedesaan. Menurut HS

Dillon (2005), sektor pertanian perlu dilakukan secara komprehensif untuk memenuhi tuntutan sebagai: penyedia pangan (*food security*), penyerap tenaga kerja (*employment creation*), pengentasan kemiskinan (*poverty alleviation*), pembangunan pedesaan (*rural development*) dan konservasi lingkungan hidup (*environmental conservation*).

Upaya lain adalah lobi-lobi kuat untuk mendesak perubahan materi berbagai perjanjian bilateral sebagaimana diatur di WTO yang merugikan. Di samping perlu aturan tata niaga pupuk dan obat-obatan yang menguntungkan petani. Perlu dipikirkan pula pembaruan tata aturan kredit murah tanpa agunan bagi petani miskin sebagai *capital reform*. Demikian pula nilai tukar petani yang terus merosot perlu ada perlindungan khusus. Keterkaitan antara industri maju di kota dengan kelompok tani juga perlu diatur. Misalnya pabrik mi diimbau (diharuskan?) membeli bahan bakunya dari kelompok petani seperti bahan: bawang merah, cabai, atau gandum dan lainnya. Demikian pula pabrik-pabrik makanan instan/pabrik lainnya. Tentu saja kelompok petani tersebut sudah dibina pemerintah agar hasilnya bermutu (*backward linkages*).

(Penulis adalah Sekretaris Dewan Riset Daerah dan Ketua Koalisi Kependudukan Jawa Tengah)-d



Prakiraan Cuaca		Jumat, 8 Januari 2021			
Lokasi	Pagi	Siang	Malam	Suhu C	Kelembaban
Bantul	[Icon]	[Icon]	[Icon]	23-31	65-95
Sleman	[Icon]	[Icon]	[Icon]	23-31	65-95
Wates	[Icon]	[Icon]	[Icon]	23-31	65-95
Wonosari	[Icon]	[Icon]	[Icon]	23-31	65-95
Yogyakarta	[Icon]	[Icon]	[Icon]	23-31	65-95